

RENSTRA DINSOSPERMASDESP3A 2025-2029



KABUPATEN PURBALINGGA



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Kami dapat menyelesaikan penyusunan revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029. RENSTRA Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029, merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, sebagaimana dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang disusun setiap tahun.

Diharapkan RENSTRA-PD Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholder* tentang rencana strategis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2025 -2029.

Purbalingga, September 2025

Plt. Kepala DINSOSPERMASDESP3A
Kabupaten Purbalingga
Kepala Dinas Kesehatan

DR. JUSI FEBRIANTO, M.P.H

Pembina Tingkat I
NIP. 19700219 200212 1 004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.1.1. Landasan Hukum.....	4
1.2. Maksud dan Tujuan.....	9
1.2.1. Maksud.....	9
1.2.2. Tujuan.....	9
1.3. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	11
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	11
2.1.2. Struktur Organisasi.....	12
2.1.3. Tugas Pokok.....	15
2.2. Sumber Daya	21
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	21
2.2.2. Sarana dan Prasarana.....	23
2.3. Kinerja Pelayanan	24
2.3.1. Kinerja Urusan Sosial.....	24
2.3.2. Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	26

2.3.3. Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	28
2.4. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	36
2.4.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.4.2. Penetapan Isu – Isu Strategis.....	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten.....	40
3.1.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DINSOSPERMASDESP3A Tahun 2025-2029.....	50
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan DINSOSPERMASDESP3A Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 - 2029.....	43
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Program, Kegiatan Sub Kegiatan DINSOSPERMASDESP3A80	
4.2. Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029.....	90
4.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2029.....	99
BAB V PENUTUP	
5.1. Pedoman Transisi.....	91
5.2. Kaidah Pelaksanaan.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pembagian Personil Berdasarkan Bidang.....	23
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan DINSOSPERMASDESP3A.....	26
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DINSOSPERMASDESP3A Kab.Purbalingga.....	28
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Purbalingga tahun 2025-2030.....	38
Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DINSOSPERMASDESP3A Kab.Purbalingga tahun 2025-2030..	40
Tabel 4.2. Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030.....	45
Tabel 4.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DINSOSPERMASDESP3A Kab.Purbalingga.....	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah., merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Purbalingga. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan *good governance* dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan

rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

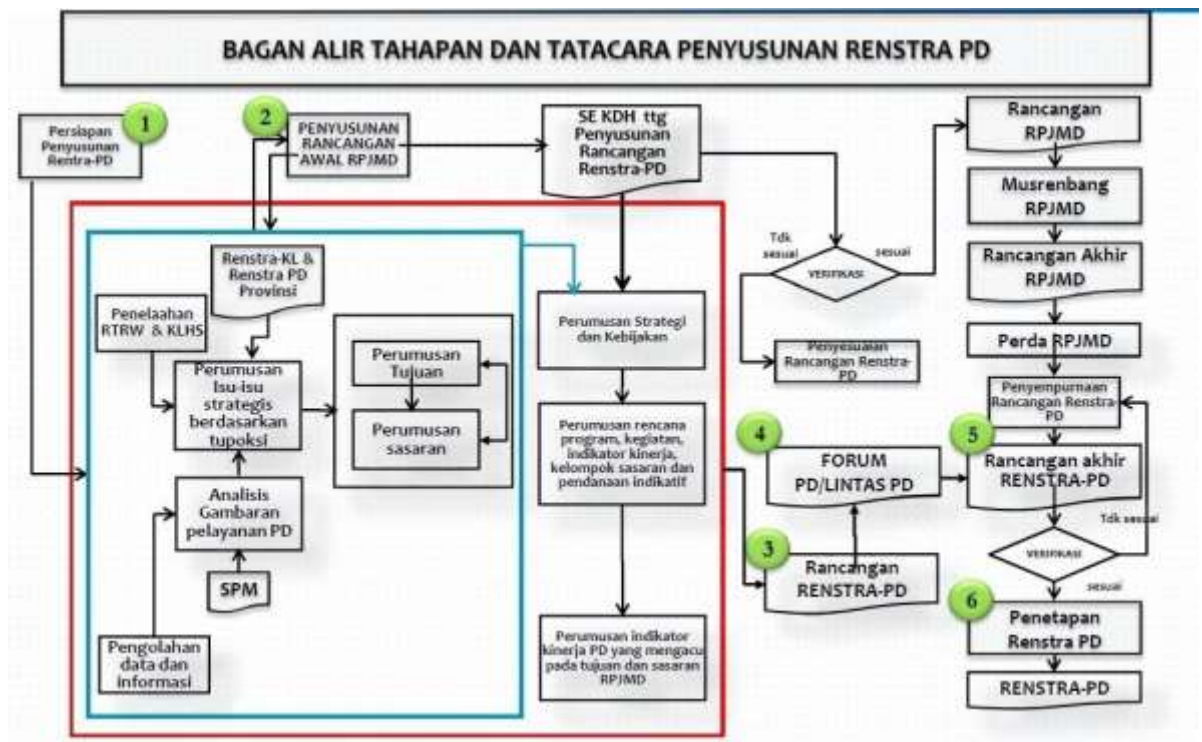
Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dibidang Sosial, Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 2025 - 2029 yang mampu memberikan gambaran tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, maka proses dan tahapan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, Renstra K/L, dan Renstra Provinsi.

Secara rinci tahapan proses penyusunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada gambar berikut.

Bagan Alir Penyusunan Renstra-PD menurut Permendagri 86
Tahun 2017



Gambar 1.1

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra
SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86
Tahun 2017

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 , berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
 17. Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2024 Tentang Desa;
 18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 19. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
21. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 27. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 34. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 37. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah: (7-191/2022));
44. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045
45. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi DINSOSPERMASDESP3A dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) DINSOSPERMASDESP3A setiap tahunnya.

1.3.2 Tujuan

Atas dasar itu maka Renstra DINSOSPERMASDESP3A Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan DINSOSPERMASDESP3A untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Menyediakan acuan resmi bagi DINSOSPERMASDESP3A Kabupaten Purbalingga dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Purbalingga;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kabupaten Purbalingga;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DINSOSPERMASDESP3A Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DINSOSPERMASDESP3A Kabupaten Purbalingga untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun;

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis DINSOSPERMASDESP3A.

Bab II Gambaran Pelayanan dan Isu – Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya DINSOSPERMASDESP3A, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan, serta berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DINSOSPERMASDESP3A, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah DINSOSPERMASDESP3A, beserta strategi dan kebijakan yang akan diambil, selain itu bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan beserta dengan indikator dan target yang akan di capai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra DINSOSPERMASDESP3A.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINSOSPERMASDESP3A

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 87 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Sosial, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi di bidang perumusan kebijakan teknis dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang :

1. perumusan kebijakan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Sosial, bidang

- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. pelaksanaan administrasi kesekretariatan DINSOSPERMASDESP3A;
 6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
 7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

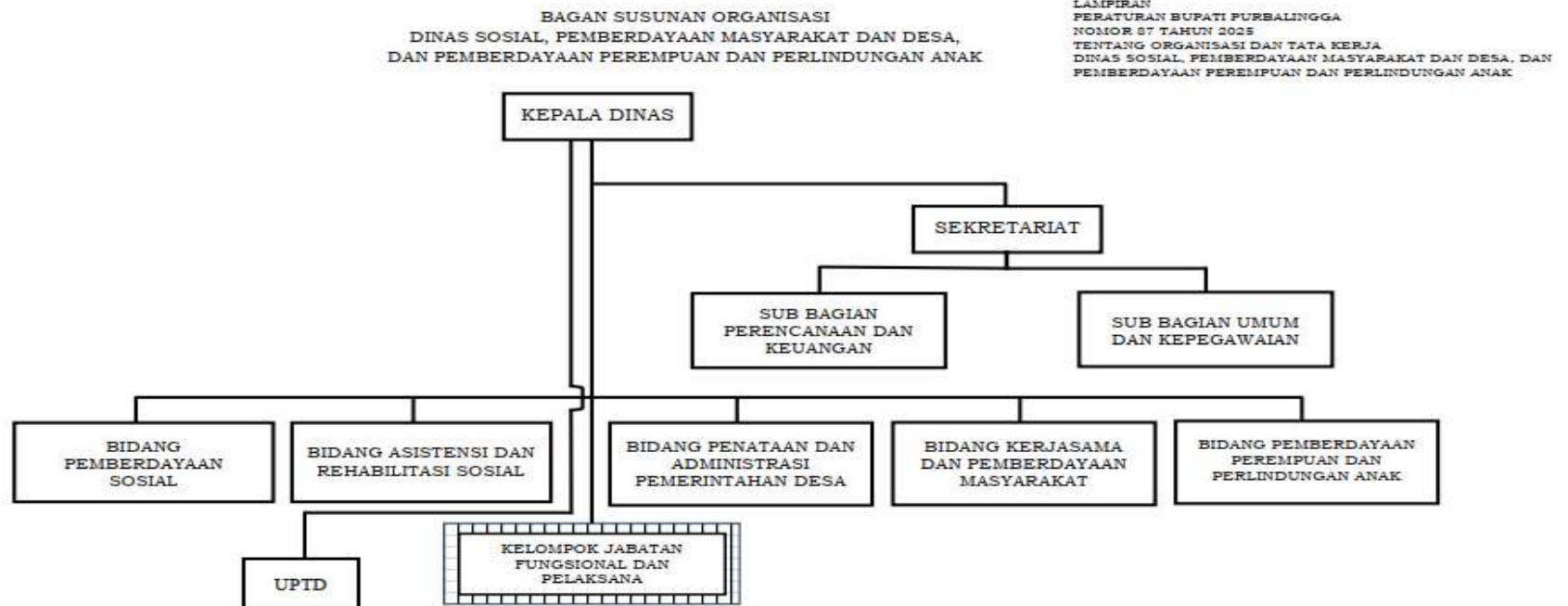
b. Struktur Organisasi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 05 tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun bagan struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA



Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 17 November 2025
SEKRETARIS DAERAH

HERNI SULASTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 87

BUPATI PURBALINGGA

FAHMI MUHAMMAD HANIF

c. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 87 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, mempunyai uraian tugas pokok sebagai berikut:

1) Tugas pokok kepala Dinas :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan DINSOSPERMASDESP3A;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Tugas pokok Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administrative bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINSOSPERMASDESP3A. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan DINSOSPERMASDESP3A;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DINSOSPERMASDESP3A;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), reformasi birokrasi, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan DINSOSPERMASDESP3A;

- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DINSOSPERMASDESP3A;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Tugas pokok bidang Pemberdayaan Sosial :

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengebangan Potensi Sosial, Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pengembangan Potensi dan Sumber Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PSKS);
- b. Pembinaan organisasi dan kelembagaan sosial masyarakat, jaringan kesejahteraan sosial;
- c. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- d. Akreditasi lembaga pelayanan sosial masyarakat;
- e. Penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang Kesejahteraan Sosial;
- f. Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Usaha Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- g. Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial;
- h. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejungan serta nilai-nilai kesetiakawanan;
- i. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;

- j. Pengusulan Anugerah Satya Lancana Kebaktian Sosial serta penghargaan di bidang sosial dan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;
- k. Rekomendasi izin pengumpulan sumbangan dalam daerah; dan
- l. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4) Tugas pokok bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial :

Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Asistensi Sosial dan Rehabilitasi Sosial. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Asistensi Sosial dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pemeliharaan anak terlantar korban kekerasan eksploitasi/perdagangan/penyalahgunaan anak;
- b. Pelayanan asistensi sosial bagi keluarga fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi, keluarga tidak layak huni, lanjut usia terlantar, pekerja migrant korban kekerasan, korban bencana alam dan korban bencana sosial;
- c. Penyaluran bantuan sosial, pengembangan jaminan sosial bagi penyandang masalah lanjut usia terlantar non potensial yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. Rekomendasi pengangkatan anak;
- e. Perujukan korban kekerasan terhadap anak dan pekerja migrant bermasalah;
- f. Penanggulangan dan penanganan bencana;
- g. Pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- h. Penyaluran bantuan sosial/pemeliharaan taraf hidup dan aksesibilitas bagi pengandang cacat;
- i. Pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang berasal dari keluarga tidak mampu;

- j. Rehabilitasi sosial bagi tuna sosial yaitu tuna susila, pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT), anak jalanan dan anak nakal;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5) Tugas pokok Bidang Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa :

Kepala bidang Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penataan Desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kerja sama antar Desa;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

6) Tugas pokok Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat :

Kepala Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah serta pemberdayaan

masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat kampung dan perkampungan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi dan investasi Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

7) Tugas pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kemitraan pemberdayaan perempuan;
- b. Perlindungan hak asasi perempuan, kesehatan perempuan;
- c. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- d. Menumbuhkembangkan organisasi dan peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan gender;
- e. Pengawasan terhadap perdagangan perempuan serta pembinaan jaringan institusi;
- f. Perlindungan hak asasi anak;
- g. Pengawasan terhadap perdagangan anak;
- h. Pengawasan terhadap pekerja anak di bawah umur;
- i. Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan untuk menumbuhkembangkan anak;
- j. Pembinaan jaringan institusi; dan

- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Sumber Daya DINSOSPERMASDESP3A

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinsos Dalduk KB P3A Kabupaten Purbalingga didukung oleh personil dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jumlah Pegawai : 45 orang
 - a. ASN : 44 orang
 - a. PNS : 44 orang
 - b. PPPK : 1 orang
- 2) Jumlah Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)
 - a. Koordinator Kabupaten : 2 orang
 - b. Operator : orang
 - c. Pendamping Kecamatan : 166 orang
- 3) ASN Berdasarkan Pendidikan
 - a. S2 : 2 orang
 - b. S1 : 19 orang
 - c. Diploma III : 2 orang
 - d. SLTA : 2 orang
- 4) PNS Berdasarkan Golongan
 - a. Golongan IV : 8 orang
 - b. Golongan III : 21 orang
 - c. Golongan II : 2 orang
- 5) PNS Berdasarkan Jenis kelamin
 - a. Laki-laki : 26 orang
 - b. Perempuan : 19 orang

Tabel 2.1.
Pembagian Personil Berdasarkan Bidang

NO	BIDANG	PNS dan PPPK	NON PNS (PTT)
	KEPALA DINAS	1	
1	SEKRETARIAT	15	8
2	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	2	6
3	BIDANG ASISTENSI DAN REHABILITASI SOSIAL	2	7
4	Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa	4	
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5	
6	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	4	
7	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	3

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DINSOSPERMASDESP3A Kabupaten Purbalingga memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut :

- 1) Prasarana Infrastruktur Gedung pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - a) Gedung Kantor Dinas
- 2) Sarana Operasional
 - a) Kendaraan Roda empat : 13 unit
 - b) Kendaraan Roda dua : 52 unit
 - c) Sarana Komputer / Printer : 246 unit
 - d) Laptop : 89 unit
 - e) Pesawat Telepon : 10 unit
 - f) LCD Proyektor : 66 unit

Secara keseluruhan asset yang dikelola DINSOSPERMASDESP3A terdiri dari KIB A – F senilai Rp. 10.285.657.009,- (Sepuluh Milyar duaratus delapan puluh limajuta enam ratus limapuluh tuju ribu sembilan rupiah).

Manajemen aset dilaksanakan sesuai dengan standart baku yang sudah ditentukan, mengingat aset milik DINSOSPERMASDESP3A tersebar di beberapa tempat seperti di Desa, Kecamatan, dan di kabupaten, maka pengelolaannya sedikit mengalami kesulitan. Adapun penggunaan aset yang berupa tanah digunakan semua. Untuk aset yang lain dipergunakan semua, sedang yang sudah tidak dipergunakan seperti sepeda motor diserahkan ke Badan Keuangan Umum Daerah kabupaten Purbalingga.

e. Kinerja Pelayanan

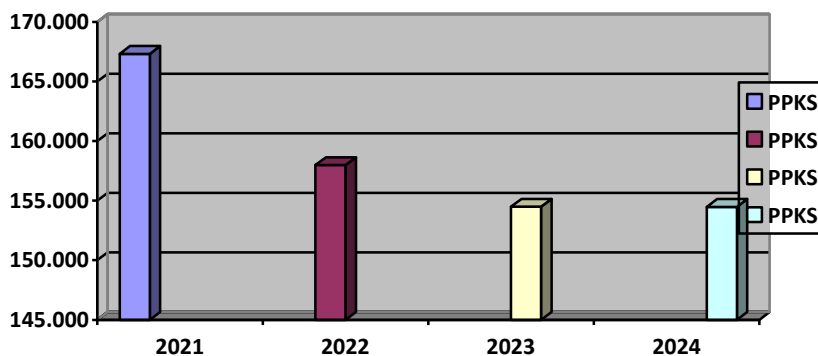
1. Kinerja Urusan Bidang Sosial

Undang-undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa negara menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat bagi rakyatnya sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945, serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Untuk memenuhi amanat tersebut pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan sosial yang meliputi kebijakan, perencanaan, kerjasama, pembinaan bidang sosial, identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pelaksanaan, pengawasan, pelaporan bidang sosial, sarana dan prasarana bidang sosial dan pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial.

Persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Purbalingga dalam penanganan masalah sosial adalah jumlah PPKS yang cukup besar,

meskipun jumlahnya mengalami tren menurun setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena cakupan PPKS sangat banyak yakni ada 26 indikator PPKS, dimana fakir miskin adalah salah satu di dalam indikator PPKS.

Grafik Penurunan PPKS di Kabupaten Purbalingga



Cakupan PPKS yang menerima bantuan sosial terus mengalami peningkatan. Meskipun demikian, partisipasi unsur dan kelompok masyarakat dalam mendukung program bantuan PPKS juga sangat dibutuhkan, dan saat ini semakin banyak peran serta masyarakat yang berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Meskipun jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terus meningkat setiap tahunnya, yang pada tahun 2021 lalu sebanyak 29 LKS, saat ini telah bertambah menjasi 35 LKS, namun tetap memerlukan dukungan seluruh masyarakat dalam penanganan PPKS. Disamping itu, partisipasi swasta dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga perlu terus didorong dalam mendukung program penanganan PPKS.

Tabel 2.5 Jumlah PPKS yang Mendapatkan Bantuan

Nama PPKS	2021	2022	2023	2024
Jumlah PPKS Yang Mendapatkan Bantuan	141.461	140.951	142.464	143.532

2. Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai capaian kinerja tujuan yaitu Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan indikator Prosentase Jumlah Desa Mandiri dan Maju. Berikut adalah Tabel perkembangan status desa Tahun 2020 sd 2024

Tabel 2.6 Status Desa Tahun 2020 sd 2025

STATUS DESA	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0
Tertinggal	9	2	0	0	0	0
Berkembang	162	153	137	24	11	6
Maju	51	65	81	151	144	121
Mandiri	2	4	6	49	69	97
JUMLAH DESA	224	224	224	224	224	224

Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri Tahun 2025 yaitu sebanyak 218 desa dengan demikian Prosentase Desa Maju dan Mandiri Tahun 2025 yaitu sebanyak 97,32% atau 99,54% dari target 97,77% .

Tabel 2.7 Jumlah RT/RW Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH RW	JUMLAH RT
1	KALIGONDANG	18	117	371
2	KUTASARI	14	115	263
3	KARANGJAMBU	6	27	144
4	REMBANG	12	68	340
5	MREBET	19	94	338
6	PURBALINGGA	13	68	251
7	BOJONGSARI	13	125	287
8	BOBOTSARI	16	109	346
9	KARANGREJA	7	53	247
10	KEJOBONG	13	109	251
11	PADAMARA	14	60	245
12	KALIMANAH	17	99	349

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH RW	JUMLAH RT
13	KEMANGKON	19	129	347
14	BUKATEJA	14	103	366
15	PENGADEGAN	9	72	211
16	KARANGANYAR	13	47	221
17	KERTANEGARA	11	47	225
18	KARANGMONCOL	11	112	323
	JUMLAH	239	1554	5125

3. Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan program dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berjalan baik, hal ini ditunjukkan dengan pencapaian kinerja pembangunan sebagai berikut :

1) PROGRAM PENGELOLA SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Pengolahan, analisis dan penyajian Data Gender dan Anak terealisasinya program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya penyusunan buku Profil Gender sebanyak 30 buku dan buku Profil Anak sebanyak 30 buku yang akan disusun oleh tim .Dalam prosesnya akan ada SK Forum Data lintas OPD, dilaksanakan Rakor Forum lintas Data dan di susun Tim Teknis Penyusunan buku Profil Gender dan Profil Anak, adapun tujuan penyusunan profil anak yaitu memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak – anak di Kabupaten Purbalingga dari aspek : struktur penduduk dan kepemilikan akte kelahiran , lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan serta perlindungan khusus dan tujuan penyusunan buku profil Gender yaitu untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kondisi penduduk laki – laki dan perempuan di Kabupaten Purbalingga dilihat dari berbagai aspek. Aspek tersebut adalah : Kependudukan, Kesehatan, Keluarga Berencana (KB) , Pendidikan,

Ketenagakerjaan, Politik dan sektor Publik serta kekerasan berbasis Gender. Gambaran ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas kebijakan, program dan kegiatan di masing – masing bidang guna mengurangi kesenjangan Gender yang terjadi.

2) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK

1. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota dimana dalam pelaksanaannya untuk pertemuan forum anak di tingkat kabupaten sebanyak 3 kali dalam satu tahun.
 - b. pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pelaksanaannya pembuatan stiker dan pamflet dalam rangka mensosialisasikan program pemenuhan hak anak agar bisa mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lalu kegiatan siaran radio tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan di Radio LPPM Gema Sudirman Purbalingga. Di sela – sela itu ada waktu untuk forum anak mengisi acara dalam rangka mensosialisasikan keberadaan forum anak Kabupaten Purbalingga yang pembentukannya di dasari SK Bupati.dan diperbarui tiap tiga tahun sekali melalui proses pemilihan pengurus.
 - c. Penguatan jejaring antar lembaga layanan peningkatan kualitas hidup anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota . Kegiatan ini dalam bentuk terlaksananya pelatihan Konvensi Hak Anak bagi kepala sekolah SD/MI, forum anak, forum lintas perempuan dan dari Organisasi Masyarakat dengan

tujuan agar semua elemen dari bawah sampai keatas bisa memahami hak - hak anak sehingga bisa mengimplemantasikan di kehidupan sehari - hari sehingga hal ini bisa menekan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Kegiatan Pelembagaan Pemenuhan hak anak pada Lembaga Pemerintah, non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.

a. Advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Layak Anak Tingkat Kabupaten pada kelima Kluster.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya Sosialisasi dan Pembentukan Tim Gugus Tugas Desa atau Kelurahan dan Forum anak Tingkat Desa/Kelurahan.

3) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah

a. Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota.

Realisasi kegiatan ini terlaksananya kegiatan Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis sekolah yang bekerja sama dengan narasumber dari luar DINSOSPERMASDESP3A dengan tujuan agar disekolah tidak terjadi kekerasan terhadap anak dan pembulian sesama

teman serta anak akan mengetahui tentang hukum. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota.

Realisasi kegiatan pembuatan benner tentang pencegahan kekerasan terhadap anak yang akan dipasang di tempat – tempat yang strategis agar bisa di lihat dan diketahui banyak orang. Disamping itu melaksanakan rapat PTT Harapan bagi Tim anggota PTT Harapan dengan tujuan untuk berkoordinasi dan menyamakan persepsi dalam implementasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

2. Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

a. Penyediaan layanan pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi kegiatannya pemberian honor pada pendamping kasus, memfasilitasi biaya medical legal berupa pelayanan jasa kesehatan, penanganan dampak social kemasyarakatan, visum et Psikiatrium, visum et repertum pemeriksaan korban hidup, visum et repertum pemeriksaan korban mati, visum et repertum pemeriksaan korban mati pemeriksaan luar, visum et repertum korban mati pemeriksaan penunjang, memfasilitasi biaya tenaga ahli, memfasilitasi operasional rumah perlindungan bagi korban, sehingga korban akan merasa aman selama dalam proses hukum, memebrikan bantuan sembako bagi korban serta menyiapkan pakaian bagi korban yang menginap di rumah perlindungan selama dalam pemeriksaan hukum

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan DINSOSPERMASDESP3A Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase PPKS Yang Terlayani		70		30	40	50	60	70	16.65	68.56	85.58	75.96	77.09	55.5	171.4	171.16	126.6	110.1
2	Jumlah Desa yang Naik Status (Desa)		33		NA	26	14	13	7	11	23	20	150	33	NA	88,46	142	600	165
3	Indek Peberdayaan Gander (IDG)		75.52		73.09	73.11	75.51	75.52	75.52	73.09	73.11	75.51	75.52	70.61	100	100	100	100	93.4
4	Nilai Kabupaten Layak Anak		510		500	500	500	500	510	480	480	280	374.8	374.8	96	96	56	74.9	73.4

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DINSOSPERMASDESP3A Kab. Purbalingga

Uraian	Anggaran pada Tahun :					Realisasi Anggaran pada Tahun :					Ratio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun :					Rata-rata pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	4.566.925.000	5.379.157.000	8.323.336.000	5.848.063.000		4.225.906.099	5.138.031.531	4.411.804.009	5.495.877.943		0,93	0,96	0,53	0,94		-571.801.800	-575.819.749
BELANJA OPERASI	4.556.025.000	5.369.157.000	8.323.336.000	5.848.063.000		4.215.126.099	5.128.031.531	4.411.804.009	5.495.877.943		0,93	0,96	0,53	0,94		-572.221.800	-576.019.749
BELANJA MODAL	10.900.000	10.000.000	0	0		10.780.000	10.000.000	0	0		0,99	1,00	-	-		420.000	200.000
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	4.567.459.500	5.730.705.000	5.267.916.000	5.372.617.000		4.238.224.941	5.538.154.006	5.120.624.861	4.886.204.241		92,79	96,64	97,20	90,95		5.234.674.375	4.945.802.012
Program Pemberdayaan Sosial	2.262.219.000	2.425.400.000	1.171.712.000	1.049.290.000		1.999.256.203	2.021.310.760	1.167.989.100	949.141.700		88,38	83,34	99,68	90,46		1.727.155.250	1.534.424.441
Program Rehabilitasi Sosial	2.697.915.000	4.950.025.000	7.181.148.000	6.959.127.000		2.676.273.649	4.804.774.200	6.995.777.240	5.529.304.300		99,20	97,07	97,42	79,45		5.447.053.750	5.001.532.347
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.476.732.749	6.100.533.000	1.974.531.000	2.319.033.000		5.121.413.650	6.059.774.350	1.965.510.300	2.160.577.150		93,51	99,33	99,54	93,16		3.388.528.946	3.826.818.863

Program Penanganan Bencana	74.535.000	382.985.000	165.422.000	17.692.000		69.559.800	117.483.900	100.168.000	8.982.000		93,33	30,68	60,55	50,77		160.158.500	74.048.425
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	212.600.000	100.000.000	71.838.000	10.000.000		201.797.375	99.662.400	71.427.300	9.996.000		94,92	99,66	99,43	99,96		98.609.500	95.720.769
Program Penataan Desa	NA	NA	19.505.000	25.174.000		NA	NA	19.351.200	25.019.800		NA	NA	0,99	0,99		22.339.500	22.185.500
Program Peningkatan Kerjasama Desa	54.750.000	94.136.000	69.515.000	71.953.000		53.893.971	88.995.000	69.227.800	71.320.100		0,98	0,94	0,99	0,99		72.588.500	70.859.218
Program Administrasi Pemerintahan Desa	770.071.000	832.461.000	516.530.000	897.867.000		717.109.863	788.292.228	453.820.809	852.356.627		0,93	0,94	0,88	0,95		754.232.250	702.894.882
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	453.480.000	836.897.000	4.302.032.000	1.183.154.000		390.000.836	785.117.705	583.215.690	1.136.843.331		0,86	0,94	0,14	0,96		1.693.890.750	723.794.390

Program Pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan	513.378.000	472.585.000	211.518.000	428.073.000		466.210.065	471.139.197	211.511.000	157.016.160		90,81	99,69	100,00	36,68		406.388.500	326.469.106
Program Perlindungan Perempuan	150.645.500	96.140.000	20.463.600	38.463.000		49.472.750	90.495.550	20.319.700	17.016.400		32,84	94,13	99,30	44,24		76.428.025	44.326.100
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	22.243.200	13.000.000	5.395.000	4.316.000		22.243.100	12.999.800	5.395.000	3.915.350		100,00	100,00	100,00	90,72		11.238.550	11.138.313
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	52.507.560	96.882.000	35.067.000	137.850.000		52.502.300	96.816.900	35.035.700	134.122.900		99,99	99,93	99,91	97,30		80.576.640	79.619.450
Program Perlindungan Khusus Anak	339.492.000	130.228.000	24.645.000	179.777.000		114.309.729	122.117.974	24.629.000	58.170.150		33,67	93,77	99,94	32,36		168.535.500	79.806.713

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan.

Pada Renstra Tahun 2021 – 2026 DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga mengampu 3 urusan yaitu Urusan Sosial dengan Indikator Kinerja Cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Sejahtera Mandiri, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Indikator Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR), Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dengan Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Nilai Kota Layak Anak.

Bila di lihat pada tabel di atas, target kinerja pada setiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan di tahun 2024, hal ini di pengaruhi oleh tingkat kesadaran penerima manfaat yang berani melepaskan program Bantuan dari pemerintah .karena merasa dirinya sudah mampu dan bisa hidup dengan layak tanpa bantuan dari pemerintah.

Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Kinerja:

- a. Koordinasi dengan petugas di tingkat Kecamatan dan Desa untuk selalu update data PPKS yang ada;
- b. Dalam Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi PPKS dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Pendekatan langsung (*direct*) yaitu dalam pendekatan PPKS kita langsung menemui orangnya dengan memberikan motivasi untuk menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan sehingga tumbuh *responsive* sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan. Pendekatan tidak langsung (*indirect*) yaitu dalam pendekatan PPKS dilakukan secara tidak langsung atau melalui pihak ketiga, baik melalui tokoh masyarakat, melalui desa, atau lembaga lain yang dipandang perlu;
- c. Selalu melakukan koordinasi dengan lembaga terkait ataupun balai rehabilitasi yang telah disediakan oleh Pemerintah, dengan melakukan pembinaan, memberikan motivasi, memberikan pemantapan kecepatan dalam pemecahan masalah sehingga PPKS

- yakin bahwa mereka siap untuk ditolong dan tidak menimbulkan keraguan dengan menggunakan sarana yang ada;
- d. Pendamping tingkat Kecamatan TKSK harus setiap saat siap data yang diperlukan untuk penanganan PPKS;
 - e. Sebelum melaksanakan pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebaiknya di survey ulang agar tepat sasaran;
 - f. Pendamping Keluarga Harapan (PKH) harus mendampingi seluruh keluarga penerima manfaat disaat penarikan tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - g. Melakukan pendekatan kepada penerima manfaat untuk sabar dalam menunggu pencairan bantuan;
 - h. Mengusahakan agar tahun berikutnya dapat memberikan bantuan ke seluruh panti sosial dan panti rehabilitasi yang ada di Kabupaten Purbalingga, yaitu sebanyak 35 panti;
 - i. Memberikan pengertian tentang pengkoordinasian Kelompok Usaha Bersama (KUBe) agar bisa diterima dan dilaksanakan oleh anggota kelompok sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan berkembang;
 - j. Meningkatkan koordinasi Petugas Sosial Kemasyarakatan (PSM) yang ada di tingkat kecamatan untuk segera dibentuk Paguyuban PSM sebagai Petugas Sosial Kemasyarakatan;
 - k. Mengusulkan fasilitas kendaraan untuk memperlancar kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna dalam meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak;
 - l. Perlu adanya intensitas kunjungan dengan keluarga atau anak yang berhadapan dengan masalah hukum agar ada keterbukaan, sehingga permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan dan tertangani;
 - m. Mengajukan permohonan bantuan logistik untuk bantuan korban bencana alam maupun korban bencana sosial.

Faktor Penghambat tercapainya Kinerja Sasaran:

Permasalahan Pelayanan Urusan Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yaitu Data PMKS selalu berubah setiap saat, hal ini terjadi karena beberapa alasan antarlain kurangnya koordinasi dengan petugas di tingkat kecamatan dan desa untuk selalu mengupdate data PPKS yang ada, sehingga untuk mendorong keberhasilan Penanganan PPKS di kabupaten purbalingga perlu melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

- a. Data PPKS selalu berubah setiap saat;
- b. Motivasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan keterampilan masih menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi untuk mengharapkan imbalan;
- c. Masih sulitnya PPKS khususnya anak drop out, anak nakal, dan anak jalanan untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi pada lembaga sosial yang telah disediakan oleh pemerintah dengan alasan masih ingin berfikir bebas walaupun ada dari beberapa dari mereka yang mau untuk direhabilitasi. Hambatan lainnya juga muncul dari keluarga anak drop out, anak nakal, dan anak jalanan yang kurang peduli untuk ikut memotivasi anak mereka dengan alasan sudah tidak bisa memotivasi mereka. Selain itu ada juga alasan keluarga yang merasa berat hati untuk merehabilitasi anak mereka baik yang bermasalah difabel ataupun drop out. Keluarganya merasa tidak tega untuk anaknya direhabilitasi sehingga ada juga dari pihak anak mau untuk direhabilitasi tetapi keluarga tidak setuju;
- d. Dunia usaha yang ada belum bisa memberikan lapangan kerja kepada penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, dengan alasan tidak sesuai dengan kriteria pekerja yang ditentukan;
- e. Banyak kondisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sebagai contoh banyak PPKS yang sebetulnya mampu

- untuk bekerja dan masih produktif tetapi mereka cenderung pasrah dengan keadaan;
- f. Kegiatan pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dalam artian kadang penerima manfaat kondisinya sudah bukan kategori PPKS. Permasalahan ini dikarenakan data dari Kementerian Sosial tidak sinkron dengan data yang diperoleh dari lini lapangan yang didapatkan langsung dari pendamping tingkat Kecamatan TKSK;
 - g. Untuk pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) masih banyak yang menafsirkan bahwa program tersebut dapat dilaksanakan atau untuk perorangan sehingga yang mendapat bantuan berupa hewan ternak merasa ingin memelihara dan memiliki secara perorangan. Dari pengertian tersebut menyebabkan program ini sulit untuk berkembang;
 - h. Belum adanya bantuan sarana transportasi bagi Karang Taruna guna memfasilitasi kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna. Selain itu kurangnya penguatan di tingkat kecamatan se Kabupaten Purbalingga dikarenakan tidak adanya tanggapan di tingkat kecamatan sebagai komunikator Karang Taruna tingkat Desa;
 - a) Pada setiap tahunnya jumlah desa yang naik setatus mengalami peningkatan dan telah mencapai target yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja utama DINSOSPERMASDESP3A. Adapun faktor pendorong dan penghambat ketercapaian jumlah desa naik setatus adalah sebagai berikut.

Faktor Pendorong Keberhasilan Indikator Kinerja Sasaran:

1. Pendampingan dan pembinaan desa yang berkelanjutan, Peran aktif pendamping desa, tenaga ahli, serta pembinaan teknis dari Dinpermasdes dalam meningkatkan status dan kapasitas desa
2. Kebijakan dan regulasi yang mendukung, Sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkait pembangunan desa, termasuk dukungan terhadap pencapaian Indeks Desa (ID).

3. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
Penggunaan anggaran yang tepat sasaran untuk penguatan ekonomi desa, layanan dasar, dan infrastruktur pendukung kemandirian desa
4. Pemanfaatan data dan sistem informasi desa
Ketersediaan data desa yang akurat dan terbaru sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan desa

Faktor Penghambat Tercapainya Indikator Kinerja Sasaran:

1. Kapasitas aparatur desa, perangkat desa, dan BPD yang masih rendah dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan.
 2. Perencanaan pembangunan desa belum berbasis pada potensi dan kebutuhan riil masyarakat.
 3. Ketergantungan pada transfer pemerintah tanpa inovasi sumber pendapatan lain (BUM Desa, kerjasama desa, dll).
 4. Jalan, akses transportasi, listrik, air bersih, dan internet yang terbatas menghambat pelayanan publik dan ekonomi desa.
 5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan desa.
 6. Pengelolaan BUMDes belum optimal
- b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah ukuran statistik komposit yang menilai sejauh mana perempuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, dengan fokus pada keterlibatan dalam pengambilan keputusan, posisi profesional/manajerial, dan kontribusi pendapatan, menunjukkan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam memanfaatkan sumber daya dan kesempatan, setiap tahunnya indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Mengalami Peningkatan. Adapun permasalahan pencapaian IDG adalah sebagai berikut.
- Permasalahan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yaitu Belum adanya perangkat daerah yang melaksanakan PPRG, belum optimalnya Pokja PUG Kabupaten dan vokal poin di 26 OPD dan 18 Kecamatan, belum tercapainya kuota perempuan di lembaga

legislatif, belum optimalnya kinerja kelembagaan PUG, masih ditemukannya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, belum optimalnya pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan, belum semua Perangkat Daerah memiliki data pilah Gender dan anak

Permasalahan yang dihadapi :

Kurang berfungsinya pokja PUG dalam mensosialisasikan program yang responsif gender di masing –masing OPD.

Solusinya adalah :

Meningkatkan koordinasi dengan lintas OPD, mengadakan pelatihan/bintek tentang penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud cukup lengkap.

Permasalahan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yaitu belum terpenuhinya nilai indikator untuk mendapatkan Penghargaan Kota layak anak, belum terpenuhinya hak partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, kurangnya jumlah bermain ramah anak yang sesuai standar, belum tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan khusus untuk anak dilembaga pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit), masih ditemukannya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, belum optimalnya pelayanan terhadap anak korban kekerasan, hal tersebut terjadi karena kurangnya SDM dan Pemahaman dari OPD di Kab. Purbalingga dalam pembuatan PPRG dan ARG, sudah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan tetapi kurang tindak lanjutnya, Kurangnya Personil TIM HARAPAN di tingkat Kecamatan, kurangnya SDM tenaga penyedia data pilah gender di OPD.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritas

kan karena tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam satu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan yang dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksud guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan analisa Gambaran Umum selama 5 tahun, maka Permasalahan Pembangunan Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi.

Maka permasalahan yang dihadapi sesuai dengan Tupoksi Dinas adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan berkaitan Urusan Sosial

- a. Belum optimalnya kualitas pemberdayaan PPKS
- b. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas dalam pelayanan PPKS

- c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sdalam pelayanan dan pembinaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar,glandangan dan pengemis
- d. Belum optimalnya kualitas dan kuantitass pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- e. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial).

2. Permasalahan Terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Rendahnya kualitas perencanaan dan penganggaran desa yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
- b. Ketergantungan pada dana transfer pusat (Dana Desa dan ADD) masih tinggi, karena minimnya potensi PADes (Pendapatan Asli Desa).
- c. Belum optimalnya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama Belum optimalnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
- d. Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) belum merata dan belum optimal digunakan untuk pelayanan publik dan transparansi

3. Permasalahan Terkait Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum semua perangkat daerah yang melaksanakan PPRG
- b. Masih ditemukannya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan
- c. Belum optimalnya pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan.
- d. Belum semua Perangkat Daerah memiliki data pilah Gender dan anak
- e. Kurangnya jumlah taman bermain ramah anak yang sesuai standar
- f. Masih ditemukannya kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
- g. Belum optimalnya pelayanan terhadap anak korban kekerasan.

b. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DINSOSPERMASDESP3A adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak diantisipasi akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Purbalingga, maka dapat ditetapkan isu strategis DINSOSPERMASDESP3A Kabupaten Purbalingga, yaitu :

1. Belum optimalnya pelayanan terhadap PPKS;
2. Belum optimalnya pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) **sebagai motor ekonomi desa**.
3. Kurangnya kapasitas kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tata kelola pemerintahan desa.
4. Kurangnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa.
5. Belum optimalnya pembangunan Gender di Kabupaten Purbalingga;
6. Masih tingginya kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak;
7. Belum optimalnya pemenuhan hak anak.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks, mengingat tugas dan fungsi perangkat daerah terkait dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati. Adapun penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 -2029 diuraikan sebagai berikut :

A. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINSOSPERMASDESP3A TAHUN 2025-2029

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai DINSOSPERMASDESP3A dalam kurun waktu tahun 2025 - 2029, yaitu:

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Desa, kesetaraan gender serta perlindungan anak dengan Indikator kinerja tujuan yaitu:

- a. Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri;
- b. Indeks Desa;
- c. Indeks Ketimpangan Gender (IKG);
- d. Nilai Kabupaten Layak Anak.

Dari satu tujuan dan empat indikator kinerja tujuan tersebut di atas, maka di dukunglah dengan 5 Sasaran dan 5 indikator kinerja sasaran antarlain yaitu:

- a. Meningkatnya perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator kinerja sasaran
Cakupan PPKS yang mendapatkan program pemerintah;

b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa
dengan indikator kinerja Persentase Desa Mandiri

c. Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dengan indikator kinerja
sasaran Nilai Evaluasi Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE);

d. Meningkatnya Perlindungan Anak dengan indikator kinerja
sasaran Indek Perlindungan Anak (IPA).

e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan
indikator kinerja sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah;

Secara rinci keterkaitan tujuan dan sasaran dengan indikator sasaran
yang akan dicapai DINSOSPERMASDESP3A Kabupaten Purbalingga
dalam kurun waktu tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra DINSOSPERMASDESP3A

No	NSPK dan Sasaran RPJM Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun						Kon disi Akhir
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul serta Ketahanan Sosial yang Adaptif	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Desa, kesetaraan gender serta perlindungan anak		Cakupan KPM Garduasi Sejahtera Mandiri	Persen	2,65	5,31	7,96	10,61	13.27	13.27	13.27
				Meningkatnya perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS)	Persen	85,7	86,2	86,7	87,2	87,7	88,2	88.2

No	NSPK dan Sasaran RPJM Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun						Kondisi Akhir
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Indeks Desa	Angka	0,7891	0,8711	0,8257	0,8337	0,8417	0,8497	0,7891
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Presentase Desa Mandiri	Per sen	43,30	44,20	44,64	45,09	45,54	45,98	43,30
				Indek Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,212 -	0,210 -	0,208 -	0,206 -	0,204 -	0,202 -	0,212 -
			Meningkatnya keberdayaan perempuan	Nilai Evaluasi Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE)	Predikat	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya
				Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	732.65	742,50	762,50	733	788	800	800
			Meningkatnya perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	62,30	62,50	62,70	63	63	63	63

No	NSPK dan Sasaran RPJM Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun						Kon disi Akhir
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	73.50	73.51	73.52	73.53	73.54	73.55	73.5

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINSOSPERMASDESP3A DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025 – 2029

Dalam rangka upaya Pencapaian tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah di berjanjikan dalam Perjanjian kinerja, maka Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, koordinasi dengan lintas sektoral;
2. Menurunkan jumlah PPKS melalui pemberian bantuan Sosial, pelatihan ketrampilan, pembinaan dan pendampingan bagi PPKS;
3. Meningkatkan persentase desa mandiri;
4. Meningkatkan proporsi anggaran responsif gender melalui pelatihan PPRG, penyusunan GBS, penyusunan keijakan responsif gender;
5. Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui koordinasi lintas sector dan sosialisasi
6. Meningkatkan kualitas pelayanan korban kekerasan melalui penyediaan sarana prasarana, penyediaan SDM yang kompeten, KIE, pendampingan korban

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan diatas, kebijakan yang ditempuh DINSOSPERMASDESP3A untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang, yaitu:

1. Peningkatan kualitas kinerja dengan prioritas pada pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi SDM;

2. Penangan PPKS.
 3. Peningkatan 4 pilar utama yaitu Infrastruktur desa, Ekonomi lokal, Partisipasi masyarakat dan Pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
 4. Peningkatan implementasi PUG dengan proiritas pada penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 5. Peningkatan pemenuhan hak anak dengan prioritas pada sektor – sektor yang membutuhkan dukungan dari stake holder lain;
 6. Peningkatan kualitas layanan korban sesuai dengan standar yang ada
- Keterkaitan antara strategi, kebijakan dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis DINSOSPERMASDESP3A Antara lain sebagai berikut.

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra DINSOSPERMASDESP3A

No	Oprasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
	Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul serta Ketahanan Sosial yang Adaptif	Penguatan basis data terpadu kesejahteraan sosial, peningkatan jangkauan program bantuan sosial, serta layanan rehabilitasi dan pemberdayaan bagi kelompok rentan.	Penanganan PPKS,	
		Pengembangan desa mandiri sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan	Penguatan / Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes	
			Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan Berkelanjutan terkait Kinerja BUMDes	

			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), workshop, dan pendidikan berkelanjutan terkait tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan, dan pengawasan.	
			Penguatan Peran BPD melalui bimtek/sosialisasi/workshop	
		Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi, politik, dan perlindungan dari kekerasan.	Peningkatan implementasi PUG dengan prioritas pada penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran responsif gender	
		Pemenuhan hak-hak anak melalui layanan pendidikan, kesehatan, layanan publik lainnya serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi	Peningkatan pemenuhan hak anak dengan prioritas pada sektor-sektor yang membutuhkan dukungan dari stake holder lain Peningkatan kualitas layanan korban sesuai dengan standar yang ada	

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah

DINSOSPERMASDESP3A Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kesejahteraan sosial dan Kesejahteraan Masyarakat desa, kesetaraan gender serta perlindungan anak	Meningkatnya perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Menurunkan jumlah PPKS melalui pemberian bantuan sosial, pelatihan ketrampilan, pembinaan dan pendampingan bagi PPKS	Penangan PPKS.
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Pengembangan desa mandiri sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan	<p>Penguatan / Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes</p> <p>Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan Berkelanjutan terkait Kinerja BUMDes</p> <p>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), workshop, dan pendidikan berkelanjutan terkait tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan desa,</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<p>pengelolaan keuangan, dan pengawasan.</p> <p>Penguatan Peran BPD melalui bimtek/sosialisasi/workshop</p> <p>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</p>
	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	Meningkatkan proporsi anggaran responsif	Peningkatan implementasi PUG dengan prioritas pada penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran responsif gender
	Meningkatnya Perlindungan anak	<p>Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui koordinasi lintas sektor, Sosialisasi</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan korban kekerasan melalui penyediaan sarana prasarana, penyediaan SDM yang kompeten, KIE, pendampingan korban</p>	<p>Peningkatan pemenuhan hak anak dengan prioritas pada sektor-sektor yang membutuhkan dukungan dari stake holder lain</p> <p>Peningkatan kualitas layanan korban sesuai dengan standar yang ada</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya Akuntabilitas KinerjaPerangkat Daerah	Meningkatkan nilai SAKIP DINSOSPERMASDESP3A	Melaksanakan Seluruh perbaikan dari hasil Evaluasi SAKIP

C. Manajemen Resiko Perangkat Daerah

Manajemen Resiko Pada Dasarnya dapat di pahami sebagai suatu kombinasi antar budaya, sistem dan proseds yang di lakukan oleh suatu instansi/organisasi untuk mengkoordinasikan , mengidentifikasi dan mengelola resiko. Pengtelolaan resiko strategis perangkat daerah ini bertujuan untuk mengendalikan resiko-resiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Manajemen resiko strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga (DINSOSPERMASDESP3A) dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5. Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Resiko Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPERMASDESP3A) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2029.

Tujuan Strategis		Meningkatnya kesejahteraan sosial dan Kesejahteraan Masyarakat desa, kesetaraan gender serta perlindungan anak					
Urusan Pemerintahan		Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis OPD ...						
1	Penyaluran bantuan PKH tidak tepat sasaran	RSO.2024.06.1 0.01	Verifikasi dan validasi DTKS, menugaskan operator desa untuk mentidaklayakan warganya yang di rasa sudah mampu	Kebijakan dan prosedur pengebdalian sudah dilakukan namun belum mampu menanggapi resiko teridentifikasi	Verval data kemiskinan	Kepala Dinas	Januari - Maret April - Juni Juli - September Oktober - Desember

2	Rendahnya nilai SAKIP	RSO.2024.06.1 0.01	mencukupi seluruh komponen penilaian terkait penilaian SAKIP	Kebijakan dan prosedur pengebdalian sudah dilakukan namun belum mampu menanggapi resiko teridentifikasi	Mengumpulkan dokumen pendukung penilaian SAKIP	Kepala Dinas	Januari - Maret April - Juni Juli - September Oktober – Desember
3	Belum semua desa menyusun rencana anggaran biaya dan gambar teknis dengan baik	RS.2024.001	Melakukan Pendampingan kepada Pemdes		Upaya melaksanakan Bintek penyusunan RAB	Kepala Dinas	Januari - Maret April - Juni Juli - September Oktober – Desember
4	Kurangnya konektivitas kerjasama antardesa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	RS.2024.002	memberikan dorongan dan motivasi tentang pentingnya kerjasama antardesa		memonitor kerjasama anatrdesa yang sudah dilaksanakan	Kepala Dinas	Januari - Maret April - Juni Juli - September Oktober – Desember
5	belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi desa	RS.2024.003	menginventisiris permasalahan - permasalahan yang terjadi di desa		menginventisiris permasalahan - permasalahan yang terjadi di desa	Kepala Dinas	Januari - Maret April - Juni Juli - September Oktober – Desember

6	Kurangnya Penguasaan Regulasi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW, Posyandu, PKK, Karang Taruna)terkait Perencanaan,Monito ring,Pelaksanaan Pembangunan dan Desa	RS.2024.011	memberi pemahaman kepada PemerintaH Desa tentang Regulasi Kelembagaan		memberi pemahaman kepada PemerintaH Desa tentang Regulasi Kelembagaan	Kepala Dinas	Januari - Maret April - Juni Juli - September Oktober – Desember
7	Kurangnya Swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa	RS.2024.015	mendorong masyarakat untuk menggiatkan kembali gotong royong		mendorong masyarakat untuk menggiatkan kembali gotong royong	Kepala Dinas	Januari - Maret April - Juni Juli - September Oktober – Desember
8	Minimnya penganggaran yang responsif gender	RSO.2024.08.1 0.01	Menyusun GAP dan GPS anggaran Responsif Gender	Kebijakan dan prosedur pengebdalian sudah dilakukan namun belum mampu menanggapi resiko teridentifikasi	Peningkatan penggunaan anggaran responsif gender	Kepala Dinas	Januari - Maret April - Juni Juli - September Oktober – Desember

9	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas.	RSO.2024.08.1 0.01	Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait tindak kekerasan terhadap anak, berkoordinasi dengan Pihak terkait dalam menangani korban kekerasan terhadap anak	Kebijakan dan prosedur pengebdalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani resiko teridentifikasi	Pelaporan kekerasan terhadap perempuan	Kepala Dinas	Januari - Maret April - Juni Juli - September Oktober - Desember
10	Minimnya laporan tindak kekerasan terhadap anak, Perempuan, lansia, Penyandang disabilitas	RSO.2024.08.1 0.01	Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait tindak kekerasan terhadap Perempuan, berkoordinasi dengan Pihak terkait dalam menangani korban kekerasan terhadap anak	Kebijakan dan prosedur pengebdalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani resiko teridentifikasi	Pelaporan kekerasan terhadap anak	Kepala Dinas	Januari - Maret April - Juni Juli - September Oktober – Desember

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DINSOSPERMASDESP3A

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DINSOSPERMASDESP3A yang akan dilaksanakan Pada tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

A. Program Pemberdayaan Sosial

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.3. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

B. Program Rehabilitasi Sosial

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
 - 1.1. Penyediaan Sandang
 - 1.2. Penyediaan Alat Bantu

- 1.3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- 1.4. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- 1.5. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- 1.6. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- 1.7. Pemberian Layanan Kedaruratan
- 1.8. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- 1.9. Pemberian Layanan Rujukan

C. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

D. Program Penanganan Bencana

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
 - 1.1. Penyediaan Makan
 - 1.2. Penyediaan Sandang
 - 1.3. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

E. Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

1. **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional**

Kabupaten/Kota

- 1.1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- 1.2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

F. Program Adminstrasi Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi Kerjasama antar desa
 - 1.1. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota
 - 1.2. Fasiltasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota.

G. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat kabupaten /Kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama pelakunya
 - 1.1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 1.2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

H. Program Program Peningkatan Kerjasama Desa

1. Penyelenggaraan Penataan Desa
 - 1.1. Fasilitasi Tata Wilayah Desa
 - 1.2. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
 - 1.3. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
 - 1.4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- 1.5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- 1.6. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
- 1.7. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
- 1.8. Fasilitasi Penyusunan Profil desa
- 1.9. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
- 1.10. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- 1.11. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- 1.12. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

I. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, sosial dan ekonomi
 - 2.2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

J. Program Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1.2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

1.3. Penguatan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

2.2. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota

- 3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

K. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.

L. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

- 2.3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

M. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para
Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk
mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak
anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA
 - 1.2. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam
pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
 - 2.1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
 - 2.2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
 - 3.1. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan

perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah
kabupaten/kota

Tabel 4.1.

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DINSOSPERMASDESP3A

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul serta Ketahanan Sosial yang Adaptif	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat dan desa, kesetaraan gender serta perlindungan anak				Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	
		Meningkatnya perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Cakupan PPKS yang Mendapatkan Program Pemerintah	
			Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terpenuhinya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlibat dalam Penanganan Masalah Sosial		Program Pemberdayaan Sosial
			Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlibat dalam Penanganan Masalah Sosial		Cakupan PSKS yang dibina	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
			Meningkatnya Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti	Program Rehabilitasi Sosial
				Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan	Persentase layanan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
				pengemis di luar panti sosial	disediakan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan
			Meningkatnya kualitas data perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin		Persentase Fakir Miskin Mendapatkan Penanganan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Terlaksananya pemutakhiran data fakir miskin daerah di seluruh desa/kelurahan	Persentase desa/kel yang aktif melakukan pemutakhiran data fakir miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
					Kabupaten/Kota	
						Program Penanganan Bencana
				Terlaksananya penanganan bagi korban bencana alam dan sosial	Persentase layanan dasar yang disediakan bagi korban bencana alam dan sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
				Terlaksananya peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana	Persentase Taruna Siaga Bencana yang meningkat kapasitasnya	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
					Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Sesuai Standar	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
				Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			Presentase Desa Mandiri	
					Persentase Desa yang Difasilitasi Proses Penataan Desa	Program Penataan Desa
					Persentase Desa yang Difasilitasi Proses Penataan Kewenangan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Fasilitasi Tata wilayah Desa

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
				Terlaksananya Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangnya	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa
				Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa
					Persentase Desa yg Melakukan Kerjasama Aktif (Baik Antar Desa dan Desa dengan Pihak Ketiga)	Program Peningkatan Kerjasama Desa
					<i>Persentase Desa yang Difasilitasi Kerjasama Desa</i>	<i>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</i>
				Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Fasilitas Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota
				Terfasilitasinya Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Fasilitas Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota
					Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
					<i>Persentase desa yang difasilitasi tertib administrasi pemerintah desa</i>	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>
				Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
				Tertindakannya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Tertindakannya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
				Tertindakannya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Tertindakannya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
				Tertindakannya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
				Tertindakannya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
				Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
				Tertindakannya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
				Tertindakannya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
				Terlaksananya Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
				Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
				Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel yang Aktif	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
					Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan yang dibina	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
				Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
				Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Kehidupan yang Harmonis					Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	
					Nilai Kabupaten Layak Anak	
		Meningkatnya keberdayaan perempuan			Nilai Evaluasi Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE)	
		Meningkatnya perlindungan anak			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	
			Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan		Persentase Implementasi PUG dalam Pembangunan Daerah	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
				Terlaksananya pembangunan responsif gender	Persentase kelembagaan PUG yang aktif di OPD	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
					Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kapasitas perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Persentase perempuan yang berperan dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
					Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Meningkatnya keaktifan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP)	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) yang aktif	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
				Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	Persentase Pemenuhan Hak Perempuan Sesuai Hasil Assesment	Program Perlindungan Perempuan
				Terlaksananya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Persentase layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya tindaklanjut terhadap pelaporan kekerasan perempuan pada aplikasi Simfoni PPA	Persentase Laporan Kekerasan Perempuan yang Ditindaklanjuti pada Aplikasi Simfoni PPA	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
				Meningkatnya keaktifan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang aktif	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak		Persentase Data Gender dan Anak yang Dianalisis	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
				Meningkatnya kualitas data pada Aplikasi SIGA	Persentase Keterisian Data pada Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak)	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
					Meningkatnya pemenuhan hak anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
					Persentase nilai klaster kelembagaan dalam penilaian KLA	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia UsahaKewenangan Kabupaten/Kota
					Persentase Pembentukan Forum Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
					Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
					Meningkatnyaperlindungan khusus anak	Program Perlindungan Khusus Anak
					Persentase layanan pencegahan kekerasan terhadap anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN
					Persentase Laporan Kekerasan Anak yang Ditindaklanjuti pada Aplikasi Simfoni PPA	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
					Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak yang aktif	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baseline Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun n +1 2026		Tahun n + 2 2027		Tahun n + 3 2028		Tahun n +4 2029		Tahun n +5 2030		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatnya kesejahteraan sosial dan Kesejahteraan Masyarakat dan desa, kesetaraan gender serta perlindungan anak			Cakupan KPM Graduasi Sejahteramandiri	persen		5,31		7,96		10,61		13,27		13,27		13,27		Dinsospermasd esp3a	Purbalingga	
			Indeks Desa	angka	0,7901	0,8177		0,8257		0,8337		0,8417		0,8497		0,8497		Dinsospermasd esp3a	Purbalingga	
			Indek Ketimpangan Gender	angka		0,35-		0,34-		0,33-		0,32-		0,31 - 0,30		0,31 - 0,30		Dinsospermasd esp3a	Purbalingga	
			Nilai Kabupaten Layak Anak	angka		732,65		742,5		762,5		788		788		800		Dinsospermasd esp3a	Purbalingga	
		Meningkatnya perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Cakupan PPKS yang Mendapatkan Program Pemerintah	Persen		85,7		86,2		86,7		87,2		87,7		88,2		Dinsospermasd esp3a	Purbalingga
		Meningkatnya keberdayaan perempuan		Nilai Evaluasi Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE)	Predikat		Madya		Madya		Madya		Madya		Madya		Nindya		Dinsospermasd esp3a	Purbalingga
	Meningkatnya perlindungan anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka		62,3		62,50		62,70		63		63		63		Dinsospermasd esp3a	Purbalingga	

Renstra DinSosPerMasDesP3A Kab. Purbalingga
Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselane Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n +1		Tahun n + 2		Tahun n + 3		Tahun n +4		Tahun n +5		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinpermasdes		Nilai SAKIP	Angka	74,26	75		75,5		76		76,5		77		77		DinsospermasdesP3a	Purbalingga
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	persen	100	100	9.273.768.000	100	9.737.456.000	100	10.224.330.000	100	10.735.546.000	100	11.272.323.000	100	11.272.323.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	persen	100	100	9.917.000	100	10.412.000	100	10.932.000	100	11.477.000	100	12.051.000	100	12.051.000	DinsospermasdesP3A	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	4.749.000,00	2	4.986.000,00	2	5.235.000,00		5.496.000,00	2	5.770.000,00	2	5.770.000,00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	6	6	5.168.000,00	6	5.426.000,00	6	5.697.000,00		5.981.000,00	6	6.281.000,00	6	6.281.000,00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	persen	100	100	7.329.017.000	100	7.699.547.000	100	8.095.637.000	100	8.511.545.000	48	8.948.249.000	48	8.948.249.000	DinsospermasdesP3A	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	22	23	7.176.722.000,00	23	7.535.554.000,00	23	7.912.332.000,00	23	8.307.948.000,00	23	8.723.345.000,00	23	8.723.345.000,00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	25	25	73.635.000,00	25	82.588.000,00	25	99.018.000,00	25	116.284.000,00	25	134.413.000,00	25	134.413.000,00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	80	100	78.660.000,00	100	81.405.000,00	100	84.287.000,00		87.313.000,00		90.491.000,00		90.491.000,00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga

Renstra DinSosPerMasDesP3A Kab. Purbalingga
Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselene Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n +1		Tahun n + 2		Tahun n + 3		Tahun n +4		Tahun n +5		Target	Rp		
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp				
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	<i>persen</i>	100	100	5.700.000	100	5.895.000	100	6.100.000	100	6.315.000	100	6.541.000	100	6.541.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	4	4	5.700.000	4	5.895.000	4	6.100.000	4	6.315.000	4	6.541.000	4	6.541.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	<i>persen</i>	100	100	8.000.000	100	8.200.000	100	8.410.000	100	8.630.000	2	8.861.000	2	8.861.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	8.000.000,00	2	8.200.000,00	2	8.410.000	2	8.630.000	2	8.861.000	2	8.861.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	<i>persen</i>	100,00%	100	63.578.000	100	72.469.000	100	74.779.000	100	77.196.000	100	79.733.000	100	79.733.000	DinsospermasdesP3A	-
		Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	6	2.740.000,00	6	2.877.000,00	6	2.964.000,00	6	3.047.000,00	6	3.134.000,00	6	3.134.000,00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	6	6	30.298.000,00	6	35.532.000,00	6	36.432.000,00	6	37.377.000,00	6	38.369.000,00	6	38.369.000,00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	-	800.000,00		840.000,00		882.000,00		926.000,00		972.000,00		972.000,00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	6	6	7.070.000,00	6	8.420.000,00	6	8.651.000,00	6	8.894.000,00	6	9.149.000,00	6	9.149.000,00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga

Renstra DinSosPerMasDesP3A Kab. Purbalingga
Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselene Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n +1		Tahun n + 2		Tahun n + 3		Tahun n +4		Tahun n +5		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	4	4	16.670.000,00	18.500.000,00	19.235.000,00	20.007.000,00	20.817.000,00	4	20.817.000,00	4	20.817.000,00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	4	4	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	6.945.000,00	7.292.000,00	4	7.292.000,00	4	7.292.000,00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	persen	0	100	47.160.000	49.518.000	51.989.000	54.578.000	57.292.000	1	57.292.000	1	57.292.000	DinsospermasdesP3A			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	1	47.160.000,00	49.518.000,00	51.989.000,00	54.578.000,00	57.292.000,00	1	57.292.000,00	1	57.292.000,00	DinsospermasdesP3A			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	persen	100	100	1.179.100.00	1.228.555.00	1.280.481.00	1.335.004.00	1.392.254.00	100	1.392.254.00	100	1.392.254.00	DinsospermasdesP3A			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	2	2	632.000,00	664.000,00	696.000,00	730.000,00	766.000,00	2	766.000,00	2	766.000,00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	253.978.000,00	266.677.000,00	280.011.000,00	294.012.000,00	308.713.000,00	12	308.713.000,00	12	308.713.000,00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga		
		Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	2	2	6.076.000,00	6.379.000,00	6.697.000,00	7.031.000,00	7.382.000,00	2	7.382.000,00	2	7.382.000,00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga		

Renstra DinSosPerMasDesP3A Kab. Purbalingga
Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselene Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun n +1		Tahun n + 2		Tahun n + 3		Tahun n +4		Tahun n +5		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	918.414.000,00	12	954.835.000,00	12	993.077.000,00	12	1.033.231.000,00	12	1.075.393.000,00	12	1.075.393.000,00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	persen	100	100	631.296.000	100	662.860.000	100	696.002.000	100	730.801.000	100	767.342.000	100	767.342.000	DinsospermasdesP3A		
		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	18	18	397.830.000,00	18	417.721.000,00	18	438.607.000,00	18	460.537.000,00	18	483.564.000,00	18	483.564.000,00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	10	16.842.000,00	10	17.684.000,00	10	18.568.000,00	10	19.496.000,00	10	20.471.000,00	10	20.471.000,00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	216.624.000,00	1	227.455.000,00	1	238.827.000,00	1	250.768.000,00	1	263.307.000,00	1	263.307.000,00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga	
	Meningkatkannya perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Cakupan PPKS yang mendapatkan program pemerintah	Persen	85,7	86,2		86,7		87,2		87,7		88,2	88,2					
		Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlibat dalam Penanganan Masalah Sosial	persen	65,48	61,17	846.251.000	61,57	888.564.000	61,97	932.992.000	62,37	979.641.000	62,37	1.028.623.000	1.028.623.000			DinsospermasdesP3A	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselane Capaian Tahun n 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n +1 2026		Tahun n + 2 2027		Tahun n + 3 2028		Tahun n +4 2029		Tahun n +5 2030		Target	Rp		
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PSKS yang dibina	persen	65,48	65,48	846.251.000	65,53	888.564.000	65,53	932.992.000	65,58	979.641.000	65,58	1.028.623.000		1.028.623.000	DinsospermasdesP3A	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang			456.820.000,00		479.661.000,00		503.644.000,00		528.826.000,00		555.267.000,00		555.267.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga			2.846.000,00		2.989.000,00		3.138.000,00		3.295.000,00		3.460.000,00		3.460.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	sertifikat			386.585.000,00		405.914.000,00		426.210.000,00		447.520.000,00		469.896.000,00		469.896.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti	persen	100	100	6.341.591.000	100	6.658.671.000	100	6.991.604.000	100	7.341.184.000	100	7.708.243.000	100	7.708.243.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselane Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n +1 2026		Tahun n + 2 2027		Tahun n + 3 2028		Tahun n +4 2029		Tahun n +5 2030		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase layanan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang disediakan	persen	100	100	6.341.591.000	100	6.658.671.000	100	6.991.604.000	100	7.341.184.000	100	7.708.243.000		7.708.243.000		
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			7.178.000,00		7.537.000,00		7.914.000,00		8.310.000,00		8.725.000,00		8.725.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			66.150.000,00		69.458.000,00		72.929.000,00		77.576.000,00		80.404.000,00		80.404.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			2.660.000,00		2.793.000,00		2.933.000,00		2.080.000,00		3.234.000,00		3.234.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			6.177.650.000,00		6.486.532.000,00		6.810.859.000,00		7.151.402.000,00		7.508.972.000,00		7.508.972.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	orang			79.953.000,00		83.951.000,00		88.149.000,00		92.556.000,00		97.184.000,00		97.184.000,00	DinsospermasdesP3A	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselene Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n + 1 2026		Tahun n + 2 2027		Tahun n + 3 2028		Tahun n + 4 2029		Tahun n + 5 2030		Target	Rp		
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			2.000.000,00		2.100.000,00		2.205.000,00		2.315.000,00		2.431.000,00		2.431.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			2.000.000,00		2.100.000,00		2.205.000,00		2.315.000,00		2.431.000,00		2.431.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			2.000.000,00		2.100.000,00		2.205.000,00		2.315.000,00		2.431.000,00		2.431.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			2.000.000,00		2.100.000,00		2.205.000,00		2.315.000,00		2.431.000,00		2.431.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin Mendapatkan Penanganan Sosial	persen	97,78	89,27	2.287.411.000	89,67	2.401.782.000	90,07	2.521.871.000	90,47	2.647.964.000	90,47	2.780.362.000		2.780.362.000		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/kel yang aktif melakukan pemutakhiran data fakir miskin	persen	100	100	2.287.411.000	100	2.401.782.000	100	2.521.871.000	100	2.647.964.000	100	2.780.362.000	100	2.780.362.000		
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	orang			56.746.000,00		59.583.000,00		62.562.000,00		65.690.000,00		68.974.000,00		68.974.000,00	DinsospermasdesP3A	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselene Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n + 1 2026		Tahun n + 2 2027		Tahun n + 3 2028		Tahun n + 4 2029		Tahun n + 5 2030		Target	Rp		
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga			2.230.665.00 0,00		2.342.199.00 0,00		2.459.309.00 0,00		2.582.274.00 0,00		2.711.388.00 0,00		2.711.388.00 0,00	DinsospermasdesP3A	
		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Perlindungan dan Pendampingan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	persen	100	100	150.172.000	100	157.681.000	100	165.565.000	100	173.843.000	100	182.535.000	100	182.535.000		
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase layanan dasar yang disediakan bagi korban bencana alam dan sosial	persen	100	100	137.011.000	100	143.862.000	100	151.055.000	100	158.608.000	100	166.538.000	100	166.538.000		
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			99.597.000,0 0		104.577.000, 00		109.806.000, 00		115.296.000, 00		121.061.000, 00		121.061.000, 00	DinsospermasdesP3A	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			10.062.000,0 0		10.565.000,0 0		11.093.000,0 0		11.648.000,0 0		12.230.000,0 0		12.230.000,0 0	DinsospermasdesP3A	

Renstra DinSosPerMasDesP3A Kab. Purbalingga
Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselene Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n +1 2026		Tahun n + 2 2027		Tahun n + 3 2028		Tahun n +4 2029		Tahun n +5 2030		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			27.352.000,00		28.720.000,00		30.156.000,00		31.664.000,00		33.247.000,00		33.247.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Taruna Siaga Bencana yang meningkat kapasitasnya	persen	100	100	13.161.000	100	13.819.000	100	14.510.000	100	15.235.000	100	15.997.000	100	15.997.000		
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			13.161.000,00		13.819.000,00		14.510.000,00		15.235.000,00		15.997.000,00		15.997.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Sesuai Standar	persen	100	100	173.044.000	100	181.696.000	100	190.781.000	100	200.320.000	100	210.336.000	100	210.336.000		
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	persen	100	100	173.044.000	100	181.696.000	100	190.781.000	100	200.320.000	100	210.336.000	100	210.336.000		
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	dokumen			150.000.000,00		157.500.000,00		165.375.000,00		173.644.000,00		182.326.000,00		182.326.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	maka			23.044.000,00		24.196.000,00		25.406.000,00		26.676.000,00		28.010.000,00		28.010.000,00	DinsospermasdesP3A	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselane Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n +1 2026		Tahun n + 2 2027		Tahun n + 3 2028		Tahun n +4 2029		Tahun n +5 2030		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Persentase Desa Mandiri	persen	30,8	44,20		44,64		45,09		45,54		45,98		45,98			
		Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Difasilitasi Proses Penataan Desa	persen	51,19	57,29	3.314.470.000	60,42	3.480.194.000	63,54	3.654.203.000	66,67	3.836.913.000	68,82	4.028.759.000	68,82	4.028.755.000		Purbalingga
		Penyelenggaraan penataan Desa	Persentase Desa yang Difasilitasi Proses Penataan Kewenangan Desa	persen	33,33	38,84	3.314.470.000	44,05	3.480.194.000	49,55	3.654.203.000	55,06	3.836.913.000	60,57	4.028.759.000	60,57	4.028.755.000		
		Fasilitasi Tata wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	desa	0	36	5.000.000,00	36	5.251.000,00	36	5.514.000	36	5.790.000	36	6.080.000	36	6.076.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	desa	1	1	3.000.000,00	1	3.150.000	1	3.307.000	1	3.472.000	1	3.645.000	1	3.645.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	unit	303	318	3.306.470.000	318	3.471.793.000	318	3.645.382.000	318	3.827.651.000	318	4.019.034.000	318	4.019.034.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yg Melakukan Kerjasama Aktif (Baik Antar Desa dan Desa dengan Pihak Ketiga)	persen	52,46	52,9	48.544.000	53,35	50.971.000	53,79	53.520.000	54,24	56.196.000	54,69	59.006.000	54,69	59.006.000		Purbalingga
		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Desa yang Difasilitasi Kerjasama Desa	persen	0	100	48.544.000	100	50.971.000	100	53.520.000	100	56.196.000	100	59.006.000	100	59.006.000		
		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	5.083.000,00	1	5.337.000	1	5.603.000	1	5.883.000	1	6.177.000	1	6.177.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselene Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n +1		Tahun n + 2		Tahun n + 3		Tahun n +4		Tahun n +5		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	dokumen	3	3	43.461.000,00	3	45.634.000	3	47.917.000	3	50.313.000	3	52.829.000	3	52.829.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	persen	100	100	3.506.782.000	100	3.682.121.000	100	3.866.227.000	100	4.059.539.000	100	4.262.515.000	100	4.263.515.000		Purbalingga
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang difasilitasi tertib administrasi pemerintah desa	persen	100	100	3.506.782.000	100	3.682.121.000	100	3.866.227.000	100	4.059.539.000	100	4.262.515.000	100	4.263.515.000		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	dokumen	6	6	77.064.000,00	6	120.997.000	6	84.962.000	6	120.000.000	6	93.670.000	6	93.670.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	dokumen	1	1	2.767.000,00	1	2.905.000	1	3.050.000	1	3.050.000	1	3.362.000	1	3.362.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	dokumen	224	224	5.264.000,00	224	15.527.000	224	5.803.000	224	16.093.000	224	6.397.000	224	6.397.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	dokumen	224	224	3.156.745.000	224	3.357.807.000	224	3.480.311.000	224	3.699.689.000	224	3.838.043.000	224	3.838.043.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	224	224	31.521.000,00	224	63.097.000	224	34.751.000	224	66.488.000	224	38.312.000	224	38.312.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	dokumen	1	1	3.052.000,00	1	3.204.000	1	3.364.000	1	3.532.000	1	3.709.000	1	3.709.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga

Renstra DinSosPerMasDesP3A Kab. Purbalingga
Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselene Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n +1		Tahun n + 2		Tahun n + 3		Tahun n +4		Tahun n +5		Target	Rp		
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp				
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	dokumen	2	1	10.134.000,00	1	30.640.000	1	11.172.000	1	31.730.000	1	12.316.000	1	12.316.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	laporan	0	1	173.620.000,00	0	10.000.000	1	191.416.000	0	10.000.000	1	211.036.000	1	211.036.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	laporan	1	1	10.008.000,00	1	10.508.000	1	11.033.000	1	11.584.000	1	12.163.000	1	12.163.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	dokumen	224	224	3.068.000,00	224	8.221.000	224	3.382.000	224	8.551.000	224	3.729.000	224	3.729.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	dokumen	3	2	4.569.000,00	2	4.797.000	2	5.036.000	2	5.288.000	2	5.552.000	2	5.552.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	dokumen	224	224	3.068.000,00	224	3.221.000	224	3.382.000	224	3.551.000	224	3.728.000	224	3.728.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	1540	1540	11.020.000,00	1540	25.571.000	1540	12.158.000	1540	52.756.000	1540	12.394.000	1540	13.394.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	dokumen	224	224	14.882.000,00	224	25.626.000	224	16.407.000	224	27.227.000	224	18.104.000	224	18.104.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel yang	persen		98,63	5.681.803.000	98,97	5.965.893.000	99,31	6.264.188.000	99,66	6.577.397.000	100	6.906.267.000	100	6.906.267.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselane Capaian Tahun n 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n +1 2026		Tahun n + 2 2027		Tahun n + 3 2028		Tahun n +4 2029		Tahun n +5 2030		Target	Rp		
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
		Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Aktif																
		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibina	persen			5.681.803.00		5.965.893.00		6.264.188.00		6.577.397.00	100	6.906.267.00	100	6.906.267.00		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	6.290	1771	5.255.088.00	0,00	5.517.844.00	0	5.793.739.00	0	6.083.428.00	0	6.387.600.00	0	6.387.600.00	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	unit	6	3	40.767.000,0	0	42.805.000	3	44.945.000	3	47.192.000	3	49.551.000	3	49.551.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselene Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n +1 2026		Tahun n + 2 2027		Tahun n + 3 2028		Tahun n +4 2029		Tahun n +5 2030		Target	Rp		
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	dokumen	5	5	3.781.000,00	5	3.970.000	5	4.168.000	5	4.376.000	5	4.595.000	5	4.595.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	laporan	1	1	15.291.000,00	1	16.055.000	1	16.857.000	1	17.699.000	1	18.584.000	1	18.584.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	laporan	6	1	45.805.000,00	1	48.095.000	1	50.499.000	1	53.023.000	1	55.674.000	1	55.674.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dokumen	239	239	321.071.000,00	239	337.124.000	239	353.980.000	239	371.679.000	239	390.263.000	239	390.263.000	DinsospermasdesP3A	Purbalingga
	Meningkatnya keberdayaan perempuan		Nilai Evaluasi Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE)	Predikat	Madya	Madya		Madya		Madya		Madya		Madya		Nindya		DinsospermasdesP3A	Purbalingga
	Meningkatnya perlindungan anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	62.30	62.30		62.50		62.70		63		63		63		DinsospermasdesP3A	Purbalingga
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Implementasi PUG dalam Pembangunan Daerah	persen	100	100	102.630.000	100	107.762.000	100	113.150.000	100	118.807.000	100	124.747.000	100	124.747.000		

Renstra DinSosPerMasDesP3A Kab. Purbalingga
Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselane Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n +1		Tahun n + 2		Tahun n + 3		Tahun n +4		Tahun n +5		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan PUG yang aktif di OPD	<i>persen</i>	100	100	18.042.000	100	18.944.000	100	19.891.000	100	20.886.000	100	21.930.000	100	21.930.000		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen			18.042.000,00		18.944.000,00		19.891.000,00		20.886.000,00		21.930.000,00		21.930.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang berperan dalam pembangunan	<i>persen</i>	3,66	3,66	84.588.000	3,66	88.818.000	3,66	93.259.000	3,66	97.921.000	3,66	102.817.000	-	102.817.000		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi			77.861.000,00		81.754.000,00		85.842.000,00		90.134.000,00		94.641.000,00		94.641.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen			6.727.000,00		7.064.000,00		7.417.000,00		7.787.000,00		8.176.000,00		8.176.000,00	DinsospermasdesP3A	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselene Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n +1 2026		Tahun n + 2 2027		Tahun n + 3 2028		Tahun n +4 2029		Tahun n +5 2030		Target	Rp		
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) yang aktif	<i>persen</i>	100	100		100		100		100		100		100			
		Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	dokumen														DinsospermasdesP3A	
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Pemenuhan Hak Perempuan Sesuai Hasil Assesment	<i>persen</i>	100	100	215.970.000	100	226.769.000	100	238.107.000	100	250.012.000	100	259.003.000	300	259.003.000		
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	<i>persen</i>	100	100	74.446.000	100	78.168.000	100	82.075.000	100	86.178.000	100	90.487.000	100	90.487.000		
		Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen			12.196.000,00		12.806.000,00		13.446.000,00		14.118.000,00		14.824.000,00		14.824.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	orang			38.550.000,00		40.477.000,00		42.500.000,00		44.625.000,00		46.856.000,00		46.856.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta	lembaga			23.700.000,00		24.885.000,00		26.129.000,00		27.435.000,00		28.807.000,00		28.807.000,00	DinsospermasdesP3A	

Renstra DinSosPerMasDesP3A Kab. Purbalingga
Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselene Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n +1 2026		Tahun n + 2 2027		Tahun n + 3 2028		Tahun n +4 2029		Tahun n +5 2030		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Kab/Kota																
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Kekerasan Perempuan yang Ditindaklanjuti pada Aplikasi Simfoni PPA	persen	100	100	60.634.000	100	63.666.000	100	66.850.000	100	70.193.000	100	70.193.000	100	70.193.000		
		Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang			13.884.000,00		14.578.000,00		15.308.000,00		16.073.000,00		16.073.000,00		16.073.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang			46.750.000,00		49.088.000,00		51.542.000,00		54.120.000,00		54.120.000,00		54.120.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang aktif	persen	100	100	80.890.000	100	84.935.000	100	89.182.000	100	93.641.000	100	98.323.000	100	98.323.000		
		Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga	lembaga			5.890.000,00		6.185.000,00		6.495.000,00		6.820.000,00		7.161.000,00		7.161.000,00	DinsospermasdesP3A	

Renstra DinSosPerMasDesP3A Kab. Purbalingga
Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselene Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n +1 2026		Tahun n + 2 2027		Tahun n + 3 2028		Tahun n +4 2029		Tahun n +5 2030		Target	Rp		
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			pemerintah dan non pemerintah)																
		Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	dokumen			75.000.000,00	78.750.000,00	82.687.000,00	86.821.000,00	91.162.000,00			91.162.000,00			DinsospermasdesP3A		
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Data Gender dan Anak yang Dianalisis	persen	100	100	2.658.000	2.791.000	2.930.000	3.077.000	3.231.000	100	100	3.231.000	100	3.231.000			
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterisian Data pada Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak)	persen	100	100	2.658.000	2.791.000	2.930.000	3.077.000	3.231.000	100	100	3.231.000	-	3.231.000			
		Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen			2.658.000,00	2.791.000,00	2.930.000,00	3.077.000,00	3.231.000,00			3.231.000,00			DinsospermasdesP3A		
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	angka	57,55	57,65	19.691.000	57,75	20.676.000	57,85	21.709.000	57,95	22.795.000	58,05	23.935.000	58,05	23.935.000		
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase nilai klaster kelembagaan dalam penilaian KLA	persen	91,13	91,3	11.399.000	91,4	11.969.000	91,5	12.567.000	91,6	13.196.000	91,7	13.856.000	91,7	13.856.000		
		Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan	lembaga			5.789.000,00	6.079.000,00	6.383.000,00	6.702.000,00	7.037.000,00			7.037.000,00			DinsospermasdesP3A		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselene Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n +1 2026		Tahun n + 2 2027		Tahun n + 3 2028		Tahun n +4 2029		Tahun n +5 2030		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan			5.610.000,00		5.890.000,00		6.184.000,00		6.494.000,00		6.819.000,00		6.819.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pembentukan Forum Anak	persen	0,39	5,04	8.292.000	5,04	8.707.000	5,81	9.142.000	5,81	9.599.000	6,59	10.079.000	6,59	10.079.000		
		penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen			4.045.000,00		4.248.000,00		4.460.000,00		4.683.000,00		4.917.000,00		4.917.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup	lembaga			4.247.000,00		4.459.000,00		4.682.000,00		4.916.000,00		5.162.000,00		5.162.000,00	DinsospermasdesP3A	

Renstra DinSosPerMasDesP3A Kab. Purbalingga
Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselene Capaian Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n + 1		Tahun n + 2		Tahun n + 3		Tahun n + 4		Tahun n + 5		Target	Rp		
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
		lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)																
		Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	angka	72,02	72,12	360.740.000	72,22	378.777.000	72,32	397.716.000	72,42	417.602.000	72,52	438.482.000	72,52	438.482.000	#VALUE!	-
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pencegahan kekerasan terhadap anak	persen	100	100	144.222.000	100	151.433.000	100	159.006.000	100	166.955.000	100	175.303.000	-	175.303.000		
		koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	dokumen			2.050.000,00		2.152.000,00		2.260.000,00		2.373.000,00		2.492.000,00		2.492.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi KtA tingkatKab/Kota	kegiatan			135.031.000,00		141.783.000,00		148.873.000,00		156.315.000,00		164.131.000,00		164.131.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	orang			7.141.000,00		7.498.000,00		7.873.000,00		8.267.000,00		8.680.000,00		8.680.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Persentase Laporan Anak yang Ditindaklanjuti pada Aplikasi Simfoni PPA	persen	100	100	186.048.000	100	195.350.000	100	205.117.000	100	215.373.000	100	226.142.000	-	226.142.000	#VALUE!	-

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Baselane Capaian Tahun n 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun n +1 2026		Tahun n + 2 2027		Tahun n + 3 2028		Tahun n +4 2029		Tahun n +5 2030		Target	Rp		
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
		Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang			2.658.000,00		2.791.000,00		2.930.000,00		3.077.000,00		3.231.000,00		3.231.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang			183.390.000,00		192.559.000,00		202.187.000,00		212.296.000,00		222.911.000,00		222.911.000,00	DinsospermasdesP3A	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak yang aktif	persen	100	100	30.470.000	100	31.994.000	100	33.593.000	100	35.274.000	100	37.037.000	-	37.037.000		
		Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	orang			30.470.000,00		31.994.000,00		33.593.000,00		35.274.000,00		37.037.000,00		37.037.000,00	DinsospermasdesP3A	
							32.325.525.000		33.941.804.000		35.638.893.000		37.420.836.000		39.288.367.000		39.289.363.000		

Tabel 4.2

**Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029**

No	Program Prioritas	Output/Outcame	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1		Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Layanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Bimbingan fisik mental spiritual dan sosial Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar serta PGOT Pemberian layanan dana dan pengaduan Pemberian layanan kedaruratan Pemberian layanan penelusuran keluarga	
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Pendataan fakir miskin cakupan daerah Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	
		Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	

		<p>Kesejahteraan Sosial (PPKS)</p>	<p>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)</p>	
		<p>Meningkatnya layanan dasar bencana bagi korban bencana alam dan bencana sosial</p>	<p>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</p> <p>Penyediaan Makanan</p> <p>Penyediaan Sandang</p> <p>Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</p> <p>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</p>	
	<p>Peningkatan efektivitas kegiatan di desa melalui pemberian mobil operasional desa untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas layanan dan kegiatan di desa</p>	<p>Meningkatnya Desa yang Difasilitasi Proses Penataan Desa</p> <p>Meningkatnya Desa yg Melakukan Kerjasama Aktif (Baik Antar Desa dan Desa dengan Pihak Ketiga)</p> <p>Meningkatnya Desa Tertib</p>	<p>Fasilitasi Tata wilayah Desa</p> <p>Fasilitasi Tata wilayah Desa</p> <p>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota</p> <p>Fasiltasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota</p> <p>Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</p>	

		<p>Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel yang Aktif</p>	<p>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa</p> <p>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</p> <p>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</p> <p>Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa</p> <p>Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</p> <p>Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</p> <p>Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</p> <p>Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</p> <p>Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa</p> <p>Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</p> <p>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD</p> <p>Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</p> <p>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>Fasilitasi Penyediaan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa</p> <p>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p> <p>Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</p> <p>Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</p>	
	Fasilitasi Kecamatan Berdaya	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	<p>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</p> <p>Advokasi Kebijakan dan</p>	

			<p>Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</p> <p>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
		Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	<p>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi</p> <p>Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat</p>	

			<p>Kabupaten/Kota</p> <p>Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
--	--	--	---	--

Tabel 4.3

**Penetapan Indeks Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama Dinas
Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2030**

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKD)	Angka	58,93	59,43	59,93	60,43	60,93	61,43	
2	Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	Persen	2,65	5,31	7,96	10,61	13,27	13,27	
3	Cakupan PPKS yang mendapatkan program pemerintah	Persen	85,7	86,2	86,7	87,2	87,7	88,2	
4	Indeks Desa		0,7891	0,8177	0,8257	0,8337	0,8417	0,8497	
5	Persentase Desa Mandiri		30,80	43,30	44,20	44,64	45,09	45,54	
6	Indek Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,212 - 0,202	0,210 - 0,191	0,208 - 0,180	0,206 - 0,169	0,204 - 0,158	0,202 - 0,146	
7	Nilai Evaluasi Penganugerahan Parahita Ekapraya	Predikat	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	
8	Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	732,65	742,50	762,50	788	788	800	
9	Indek Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	62,30	62,50	62,70	62,80	62,90	63,00	
10	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73.50	73.51	73.52	73.53	73.54	73.55	

Tabel 4.4

**Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten
Purbalingga Tahun 2025 – 2030**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan & Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya Diluar Panti	persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Desa yang Difasilitasi Proses Penataan Desa	Persen	57.29	60.42	63.54	66.67	68.82	68.82	
4	Persentase Desa yg Melakukan Kerjasama Aktif (Baik Antar Desa dan Desa dengan Pihak Ketiga)	Persen	52,9	53,3	53,79	54,24	54,69	54,69	
5	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	Persen	98,63	98,97	99,31	99,66	100	100	

	yang Aktif								
7	Persentase Implementasi PUG dalam Pembangunan Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Pemenuhan Hak Perempuan Sesuai Hasil Assesment	persen	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Pemenuhan Hak Perempuan Sesuai Hasil Assesment	persen	100	100	100	100	100	100	
10	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	persen	57.55	57.65	57.75	57.85	57.95	58.05	
11	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	persen	72.02	72.12	72.22	72.32	72.42	72.53	

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2025 – 2029 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purbalingga, Januari 2026

Kepala DINSOSPERMASDESP3A
Kabupaten Purbalingga

Drs. MUHAMMAD FATHURROHMAN, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199303 1 005

